



Buletin Parlementaria

Nomor 1048/II/IV/2019 • April 2019

DPR Berduka atas Insiden Christchurch



9 772614 339005

DPR Setujui Kerja Sama Indonesia
dengan Rusia di Bidang Pertahanan

Hlm. 4

Keputusan MK
Disambut Baik

Hlm. 6

DPR Berduka atas Insiden Christchurch

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menyampaikan keprihatinannya terkait insiden penembakan yang terjadi di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, belum lama ini. Ia mengapresiasi Pemerintah dan Parlemen Selandia Baru yang dengan cepat merespon insiden tersebut.

Hal tersebut disampaikan Fadli saat menerima Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Selandia

Baru dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara Kanwaljit Singh Bakshi di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3). Turut hadir Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

"Izinkan saya mewakili seluruh keluarga besar DPR RI untuk menyampaikan duka cita atas aksi yang tidak berperikemanusiaan tersebut. Penembakan di rumah ibadah, atas alasan apapun merupakan bentuk terorisme yang tidak dapat diterima," tegas Fadli.

Sisi lain, politisi Partai Gerindra itu memberikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Selandia Baru merespon aksi teror tersebut. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan sangat humanis dan menyentuh hati seluruh warga dunia, termasuk masyarakat Muslim di Indonesia.

"Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Pemerintah Selandia Baru memberikan suatu *gesture* yang sangat baik dengan melindungi para umat Islam di sana," ujarnya sembari menyampaikan harapannya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

"Di Selandia Baru memang ada kebebasan untuk memiliki senjata, namun mereka tidak pernah menduga ada orang seperti itu. Disampaikan, sekarang parlemen dan pemerintah sepakat untuk mengubah aturan itu dan bahkan akan membeli semua senjata milik penduduk dan kemungkinan akan dihancurkan," sambungnya, usai pertemuan.

Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana kunjungan diplomasi Parlemen Selandia Baru ke Indonesia pada bulan Oktober mendatang. "Mereka akan datang dalam jumlah yang sangat besar pada bulan Oktober atau November akan datang untuk meneruskan hubungan parlemen kedua negara," kata Fadli.

Menurut legislator dapil Jawa Barat V itu, waktu tersebut adalah momentum yang tepat untuk mempererat kerja sama di berbagai bidang, baik DPR RI maupun Selandia Baru. Selama ini, keduanya memiliki kerja sama yang baik di berbagai forum internasional seperti IPU dan APFF.

Empat prioritas kerja sama bilateral yang telah ditetapkan melalui Joint Commitment for Development 2017-2022, yakni energi terbarukan, peternakan/pertanian, konektivitas dan pendidikan. Kedua Parlemen juga selalu konsisten dalam mengupayakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. ■ **ann/sf**



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berdialog dengan Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Selandia Baru dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara Kanwaljit Singh Bakshi. Foto: anief/r

Pimpinan DPR Ikuti Kegiatan Donor Darah



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Foto: Azka

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto mengikuti kegiatan donor darah kerja sama Pelayanan Kesehatan (Yankes) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan PMI DKI Jakarta. Ia mengatakan, sikap kepedulian dan peduli kepada sesama dapat diwujudkan dengan berkontribusi pada kegiatan ini.

"Kami sebagai pimpinan harus memberikan contoh, bahwa pimpinan juga memiliki tugas yang sama dalam bidang kemanusiaan. Selain membawa manfaat positif bagi tubuh pendonor, kita juga dapat belajar untuk berbagi terhadap sesama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi," ungkap Agus usai mendonorkan darahnya di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3).

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, segala bentuk kegiatan kemanusiaan harus didukung seluruh pihak, terutama Pimpinan DPR RI. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang sudah

menyumbangkan sebagian darahnya bagi yang membutuhkan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan (Yankes) Bambang Zulfikar menginformasikan bahwa kegiatan donor darah rutin diselenggarakan



SEGALA BENTUK KEGIATAN KEMANUSIAAN HARUS DIDUKUNG SELURUH PIHAK, TERUTAMA PIMPINAN DPR RI

setiap tiga bulan dalam setahun. Ia mengatakan, banyak pegawai yang aktif mendonorkan darahnya.

"Hal itu terbukti dengan jumlah kantong darah yang selalu mencapai target. Bahkan untuk tahun 2019, ini merupakan pertama kalinya diadakan kegiatan donor darah dan sudah ada sekitar 250 pendonor," kata Zulfikar.

■ isn,ann/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Erman Suhendri, S.Sos.I.
Erlangga Panji Samudro, S.Ikom,
Natasya Arnanda Prihandini, S.Kom. Rahayu Setyowati,
Muhammad Husen Virgianne Meiske Patuli,
Ria Nur Mega, Devi Inandi, Hendra Sunandar,
Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Singgih
Rimbani Kinanti, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Arimbi Puspa
Ratri, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti,
Mohammad Rizki Nugraha, Puntho Pranowo.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah
Geraldji Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari,
Sunarya, Fahmi Harfa, Nathan Dimas Saminto,
Safitri Restu Widyowati, SIP.

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E. Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Ketua DPR Luncurkan Perangkat Bantu Daring Tentang KBB

Guna memperkuat DPR RI sebagai pusat ilmu pengetahuan tentang keparlemenan, DPR RI bekerjasama dengan ASEAN Parliamentarians for Human Right (APHR) dan National Democratic Institute (NDI) meluncurkan perangkat bantu daring (online toolkit) tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Dalam website www.forb-asia.org yang akan ditautkan dalam situs resmi DPR RI di www.dpr.go.id, terdapat berbagai materi yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Khususnya yang berhubungan dengan KBB.

"Setiap Anggota DPR RI dapat memanfaatkan perangkat bantu daring

tersebut untuk membagikan berbagai pengalaman mereka tentang Indonesia. Meskipun majemuk dan plural dari sisi agama dan keyakinan, tapi rakyat Indonesia bisa hidup berdampingan secara damai dan harmonis," ujar Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat meluncurkan perangkat bantu daring KBB, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (01/4).

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari, Bobby Adhityo Rizaldi, dan Lena Maryana Mukti, serta Koordinator *Southeast Asian Parliamentary Working Group on Freedom of Religion and Belief* Desi Hanara ini, Ketua DPR RI menjelaskan, semangat DPR RI

mengkampanyekan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan itu sejalan dengan semangat bangsa Indonesia dalam melindungi dan menjamin kebebasan rakyatnya dalam memeluk agama dan beribadat sesuai ajaran agama yang diyakininya.

Hal itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Jaminan konstitusi tersebut diperkuat lagi dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 175 Kitab

DPR Setujui Kerja Sama Indonesia dengan Rusia di Bidang Pertahanan

Aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Menyadari hal tersebut melalui Rapat Paripurna, DPR RI bersama dengan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Indonesia dengan Rusia di Bidang Pertahanan.

Saat Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta,

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menyerahkan laporan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia kepada Pimpinan DPR RI Foto: Eno

Kamis (28/3), dengan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto, seluruh Anggota DPR RI bersama pemerintah menyatakan persetujuan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

"Selanjutnya kami menanyakan kepada seluruh anggota, apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan atau *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence*, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Agus, dengan





Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membuka acara peluncuran perangkat bantu *online* yang diselenggarakan APHR. Foto: Jaka

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, maupun UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

"Ini menunjukkan, dari segi legal konstitusional, negara telah hadir mengayomi seluruh rakyat Indonesia

untuk beragama dan berkeyakinan sesuai kepercayaan yang dianutnya. Sejak dahulu penganut agama dan aliran kepercayaan di Indonesia bisa hidup damai berdampingan. Menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara dunia betapa perbedaan agama dan keyakinan justru menguatkan pondasi kebangsaan. Bukan malah menjadi

dijawab "Setuju" jawab oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir.

Dalam laporannya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menyampaikan, dengan adanya kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia yang diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2016 di Sochi, Rusia, Komisi I DPR RI berharap agar kemampuan pertahanan negara Indonesia semakin meningkat dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia.

"Untuk itu Komisi I DPR RI berpandangan bahwa kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara," papar

politisi Partai Gerindra ini.

Ia juga melaporkan, dalam proses persiapan pembahasan terhadap RUU tersebut, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan Pakar dan Akademisi dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tersebut. Selanjutnya Komisi I DPR RI telah melaksanakan Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah, seperti Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM pada 12 Maret 2019 lalu, untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Asril menjelaskan pembahasan Pembicaraan Tingkat I tersebut berlangsung secara kritis, mendalam dan terbuka. Akhimya Fraksi-Fraksi di DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan untuk selanjutnya dibahas

sumber pemicu perpecahan," papar Bamsuet, sapaan akrabnya.

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dan UU Nomor 5 tahun 1969, politisi Partai Golkar ini menerangkan, negara mengakui enam agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Bahkan pada November 2017, Mahkamah Konstitusi telah mengakui keberadaan penganut aliran kepercayaan.

Selain dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Bamsuet berharap perangkat bantu daring tersebut juga bisa memberikan informasi sekaligus memperkuat jaringan setiap anggota DPR RI. Sehingga antar anggota parlemen, khususnya dari kawasan Asia Tenggara, bisa saling membagikan pengalaman keberhasilan (*best practise*) di tingkat regional maupun internasional.

■ ayu/sf

dalam Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.

Di lain pihak, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu dalam sambutannya menyampaikan, dengan disetujuinya RUU ini menjadi Undang-Undang oleh DPR RI, maka terbentuklah payung hukum bagi upaya kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia.

"Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan 'Bismillahirrahmaanirrahiim' menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan untuk disahkan menjadi Undang-Undang," papar Ryamizard di mimbar ruang rapat paripurna. ■ eko/sf

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan penggunaan surat keterangan (suket) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan waktu penghitungan perolehan suara hingga tanggal 18 Maret, disambut baik. Para penyelenggara Pemilu terutama petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di berbagai daerah jadi lebih leluasa bertugas.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan hal ini saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Palembang,

”

DPT GANDA HARUS DISELESAIKAN PADA H-7, AGAR MENDEKATI HARI PENCOBLOSAN PARA PENYELENGGARA PEMILU BISA LEBIH FOKUS MENYIAPKAN HAL TEKNIS LAINNYA UNTUK MENYUKSESKAN PEMILU

Sumatera Selatan, Senin (01/4). Ia mengungkapkan, dalam regulasi Pemilu, penghitungan perolehan suara di TPS tidak boleh melewati tanggal 17 April. Namun, karena kertas suara ada lima jenis, tentu membutuhkan waktu lebih panjang untuk merekap atau menghitungnya. Para petugas TPS bisa sampai dini hari menghitung perolehan suara yang berarti sudah masuk tanggal 18 April.

Dan MK sudah mengeluarkan keputusan yang baik. Jadi penghitungan suara hingga tanggal 18 April tetap sah. "Kami gembira MK sudah membuat keputusan soal ini yang berarti penghitungan suara boleh dilanjutkan sampai tanggal 18. Kalau pakai UU, bila penghitungan lewat dari tanggal 17 dianggap batal. Dengan keputusan MK ini bisa sampai tanggal



Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera (kanan). Foto: Husen

Keputusan MK Disambut Baik

18. Jam 2 dini hari tanggal 18 itu masih sah," katanya, mengapresiasi.

Tinggal kebutuhan teknis lainnya, seperti listrik tidak mengalami gangguan selama pemungutan suara berlangsung. Mardani mengimbau, PLN memberi perhatian soal ini agar akses listrik lancar dan tak mengganggu jalannya pesta demokrasi. Listrik yang padam saat rekap perolehan suara, misalnya, sangat berdampak pada kerja para penyelenggara Pemilu terutama di daerah.

Pada bagian lain, Mardani menyinggung Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang masih kerap ada di sejumlah daerah, termasuk di Sumsel. Menurutnya, DPT ganda harus diselesaikan pada H-7, agar mendekati hari pencoblosan para penyelenggara Pemilu bisa lebih fokus menyiapkan hal teknis lainnya untuk menyukseskan Pemilu. "Semua penyelenggara Pemilu telah bekerja keras. DPT ganda harus

diselesaikan H-7. Semua yang tidak berhak mengambil suara dibuang dan yang berhak dimasukkan," imbau legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Ia juga mengapresiasi kesiapan Polda Sumsel dalam mengamankan Pemilu 2019 ini. Polda Sumsel, katanya, mempunyai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang detail dalam mengamankan setiap tahapan Pemilu. Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Sumsel itu terungkap, Polda setempat telah mengerahkan 12 ribu personel yang dibantu pula aparat TNI.

Setiap personel ditempatkan 50 meter dari TPS. "Harapan kita semua Pemilu berjalan baik. Peserta dan penyelenggara bekerja dengan baik pula. TNI/Polri bersikap netral dan tingkat partisipasi Pemilu tinggi. Inilah wujud demokrasi yang berkualitas, khususnya di Sumsel," tutup politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. ■

mh/sf

Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah



Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan. Foto: Dep

Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Hal tersebut menuntut agar percepatan reformasi birokrasi segera dilaksanakan, guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BKD Sulsel, Kakanwil BPN Sulsel, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sulsel, Ketua Perwakilan Ombudsman Sulsel, dan para Ketua KPU dan Panwas Kabupaten/Kota se-

”

**SAAT INI
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK
MASIH DIHADAPKAN
PADA KONDISI YANG
BELUM SESUAI
DENGAN KEBUTUHAN
MASYARAKAT**

Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, di Makassar, Jumat (29/3).

“Kualitas peningkatan pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan agar pelayanan prima yang cepat, mudah, pasti, umum, dan

akuntabel dapat diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik,” ucap Solthan.

Dikatakannya, saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada era globalisasi saat ini, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola pikir dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

“Birokrasi yang gemuk, lambat, dan tidak efisien, serta masih terdapat oknum penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara, akhirnya berujung pada korupsi,” tandas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Dalam pertemuan tersebut, ia juga sempat menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Hal itu mengingat Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta Pemilihan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilakukan secara bersamaan.

“Oleh karenanya dibutuhkan perencanaan yang matang. Persiapan aparatur penyelenggaraan negara yang memiliki integritas dan kompetensi serta dukungan sistem yang optimal dari seluruh stakeholder yang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Legislatif 2019 diharapkan penyelenggaraan Pemilu berjalan lancar dan aman,” tutur Solthan.

Ia mengatakan, Pemilu 2019 diharapkan dapat menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam melakukan aspirasi masyarakat, untuk memilih pemimpin Indonesia serta wakil rakyat yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Partisipasi masyarakat yang dapat ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesadaran politik pemilih, diharapkan dapat sukseskan Pemilu 2019,” pungkas legislator dapil Sulsel I itu.

■ dep/sf

DPR dan Presiden Sepakat Tolak Gugatan Kotak Kosong



Anggota Komisi III DPR RI Anwar Rachman. Foto: Jaka

Kuasa Hukum DPR RI yang juga Anggota Komisi III Anwar Rachman menyatakan bahwa DPR RI bersama Presiden telah sepakat menolak permohonan uji materi terkait pengaturan kotak kosong dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati. Menurutnya apabila kontestan yang sudah kalah dengan kotak kosong harus mengulanginya lagi dengan skema yang sama, maka sama saja dengan menghamburkan uang negara.

Hal tersebut ia sampaikan ketika ditemui *Parlementaria* usai memberikan pendapat DPR RI kepada Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, Senin (01/4). Ia menyatakan secara pribadi dirinya sepakat dengan Presiden bahwa keuangan negara harus dijaga dari hal yang sia-sia. Ia dengan terang menolak gugatan bahwa Pasangan Calon yang sudah kalah boleh ikut bertarung kembali di pemilihan selanjutnya.

”

MENURUTNYA APABILA KONTESTAN YANG SUDAH KALAH DENGAN KOTAK KOSONG HARUS MENGULANGINYA LAGI DENGAN SKEMA YANG SAMA, MAKA SAMA SAJA DENGAN MENGHAMBURKAN UANG NEGARA.

“Ini harus dicarikan dulu lawannya. Jika melawan kotak kosong saja sudah kalah, kemudian masa harus mengulangi hal yang sama melawan kotak kosong, ya inikan sama saja

membuang-buang uang negara. Itu yang kita inginkan, kalau mau carikan dulu lawannya,” tutur Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Sebelumnya salah satu pasangan Pilkada Makassar, Munafri Arifuddin-Dewi Yustisia Iqbal yang terkena fenomena kotak kosong, mengajukan gugatan ke MK perihal keinginannya mengulang kembali melawan kotak kosong tersebut. Menurut Anwar sendiri sebaiknya harus dibuat solusi lain karena selain terlihat mubazir dalam pengelolaan keuangan negara, mereka juga akan membutuhkan dana segar lagi untuk berkampanye.

“Kalau kalah lagi gimana? Mau diulang berapa kali lagi? Nah maka itu harus dicarikan solusi yang lebih tepat lagi. Artinya jangan diulang lagi dengan kotak kosong. Merekapun sebenarnya masih diberi kesempatan untuk berpartisipasi lagi dalam kontestasi Pilkada selanjutnya dan sementara ini posisi tersebut jelas masih menggunakan Plt.,” tukas Politisi dapil Jawa Timur VIII ini. ■ *er/sf*

Komisi IV Harap Konflik Kepentingan Air terselesaikan

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta permasalahan tarik ulur penggunaan air untuk tanaman pangan dan perikanan budi daya di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan segera diakhiri. Sehingga permasalahan itu tidak menimbulkan gesekan antarmasyarakat petani sebagai pemanfaat.

Demikian diungkapkan Edhy saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau saluran irigasi di Desa D Tegal Rejo, Kecamatan Tugu Mulyo dan kolam air deras perikanan budi daya, di Musi Rawas, Sumatera Selatan, Jumat (29/3).

Turut hadir, Anggota Komisi IV DPR RI Fadholi, Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, serta didampingi Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Pengembangan Bio Industri, Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan, Direktur Irigasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), dan Kepala BB Padi serta Wakil Bupati Musi Rawas.

Dalam kunjungan ini, terungkap rusaknya bendungan irigasi primer lebih dari 2 tahun menimbulkan konflik dan tarik ulur penggunaan air antara petani persawahan dan budi daya perikanan air tawar. Petani pangan menginginkan agar irigasi lancar dan merata, terutama untuk persawahan.

"Pasti ada jalan keluar. Petani airnya kurang, juga perikanan butuh air. Soal pembagian air untuk sawah dan perikanan, ini teknis, jangan tarik-menarik. Ini sudah dimediasi pemda dan kepala daerah, kita di pusat mengayomi ikut mendorong agar ada jalan tengah," papar Edhy di sela-sela peninjauan.

Mendengarkan keluhan petani, politisi Partai Gerindra ini memastikan akan segera berkoordinasi dengan



Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI meninjau irigasi di Desa D Tegal Rejo, Sumsel. Foto: Anne



PETANI PANGAN MENINGINKAN AGAR IRIGASI LANCAR DAN MERATA, TERUTAMA UNTUK PERSAWAHAN.

Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk segera memperbaiki bendungan irigasi primer yang rusak tersebut.

"Karena ini irigasi primer anggarannya ada di PUPR maka saya ingin melakukan pendekatan. Selama ini dari pihak Pemda Musi Rawas dan kota. Bahkan Pangdam sudah turun tangan, tapi tidak ada realisasi. Ini *enggak* benar, ada *deadlock* sangat berkepanjangan. Padahal secara analisa *enggak* sulit, anggarannya *enggak* mahal," jelas Edhy.

Diharapkan, dengan diperbaikinya saluran irigasi dapat memenuhi kebutuhan air bagi petani maupun pembudidaya perikanan. Kedua kelompok bisa memanfaatkan aliran air

Sungai Kelingi dengan maksimal sesuai peruntukkan dan kebutuhannya.

Edhy juga meminta Pemprov Sumsel untuk terus mengawal kasus ini, sebab aliran irigasi tersebut lintas kabupaten, dari Lubuk Linggau hingga Musi Rawas. Dikhawatirkan, ada upaya oknum yang membiarkan konflik ini berkepanjangan agar harga tanah jatuh dan petani menjual tanahnya.

"Tugomulyo ini sejak zaman Bung Karno sudah didirikan untuk lahan pertanian. Jadi kalau kita tiba-tiba melupakan itu, lalai kita sama pendahulu. Karena ini masalah air, tinggal dialiri saja, anggaran di PSP Tanaman Pangan saya yakin cukup untuk mengatasi ini," tandas politisi dapil Sumsel I ini.

Sebelumnya, Wakil Bupati Musi Rawas Suwanti mengatakan jebolnya bendungan air dari aliran Sungai Kelingi mengakibatkan petani dan petambak ikan air tawar mengalami kerugian. Bahkan ada ratusan hektar lahan pertanian telah beralih fungsi akibat kekeringan. Karena itu, ia berharap kunjungan Komisi IV DPR RI dapat memberikan solusi supaya tidak ada lagi benturan antara masyarakat petani sawah dan kolam ikan. ■ an/sf

Penyerapan dan Distribusi Beras Bulog Kurang Seimbang



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan memimpin Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI meninjau Bulog Divre Kalbar. Foto: Kresno/Inri

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan melihat ada ketidakseimbangan antara penyerapan gabah dengan distribusi beras yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Menurutnya di beberapa tempat, kapasitas Bulog sudah penuh, namun dilain sisi Bulog tidak lagi mendistribusikan beras sejahtera (rastra). Ia mengingatkan agar ada keseimbangan antara jumlah produksi dan penjualan dari gabah petani.

“Di beberapa tempat kapasitas Bulog sudah penuh, namun pada sisi lain Bulog sudah tidak lagi melakukan distribusi rastra. Harus ada kebijakan

untuk keseimbangan antara produksi dan pasar yang ujungnya pada harga gabah petani. Apalagi saat ini habis musim panen,” kata Daniel saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Bulog Divre Kalimantan Barat, Senin (01/4).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap, dalam menjalankan fungsinya, Bulog jangan sampai terkendala dengan peraturan yang ada. Komisi IV DPR RI terus mendorong pemerintah untuk menyesuaikan harga penyerapan gabah dan penjualan beras dengan harga pasar. Menurutnya Bulog mampu membeli beras petani lebih, namun tidak bisa karena ada

peraturan harga.

Sementara terkait impor bahan pangan, termasuk beras, menurutnya ada sisi baik dan buruknya. Untuk sisi buruknya, impor dilakukan tanpa perencanaan yang tepat, seperti saat masa panen dan lainnya. “Sisi baiknya, impor bisa dilakukan saat tidak memasuki masa produksi dan untuk menstabilkan harga. Artinya untuk impor itu relatif dan tinggal

”

KOMISI IV DPR RI TERUS MENDORONG PEMERINTAH UNTUK MENYESUAIKAN HARGA PENYERAPAN GABAH DAN PENJUALAN BERAS DENGAN HARGA PASAR.

disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk Kalbar sendiri saat ini sudah surplus,” ujar Daniel.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa sektor pertanian atau perkebunan yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan yakni soal karet dan kopra. “Namun harga komoditas tersebut lagi turun. Itu harus diambil langkah yakni dengan hilirisasi. Kopra contohnya, lebih mudah karena bisa dilakukan di industri kecil. Saat ini bahan baku saja rendah namun di sisi produk hilirnya tetap naik. Kita mendorong pemerintah melihat hal itu,” harap legislator dapil Kalbar itu. ■ eno/sf

Komisi IV Pastikan Stok Beras Raja Ampat



Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI meninjau gudang bulog di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Foto: Andri/rni

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau gudang beras Bulog di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Wakil Komisi IV DPR RI Michael Wattimena mengatakan, pihaknya ingin memastikan stok beras dan distribusinya dalam kondisi aman untuk 6 bulan ke depan termasuk menjelang bulan Ramadhan. Dari hasil peninjauan, gudang ini memiliki stok beras 300 ton.

“Saya sudah lihat langsung dan mendengar bahwa stok beras yang ada saat ini di gudang adalah 300 ton, dan yang sedang *on the way* ke sini ada 500 ton, sedangkan kapasitas gudang untuk menampung beras sebanyak 1000 ton. Kebutuhan beras masyarakat Raja Ampat saat ini sekitar 100 ton. Jadi saya perhitungkan, masih terakomodir untuk 6 bulan ke depan,

”

WAKIL KOMISI IV DPR RI MICHAEL WATTIMENA MENGATAKAN, PIHAKNYA INGIN MEMASTIKAN STOK BERAS DAN DISTRIBUSINYA DALAM KONDISI AMAN UNTUK 6 BULAN KE DEPAN TERMASUK MENJELANG BULAN RAMADHAN. DARI HASIL PENINJAUAN, GUDANG INI MEMILIKI STOK BERAS 300 TON.

termasuk bulan suci Ramadhan,” ungkap Michael Waisai, Raja Ampat, Jumat (29/3).

Lebih lanjut politisi daerah pemilihan (dapil) Papua Barat ini menjelaskan agar Bulog Raja Ampat menjaga dan mengantisipasi agar jalur distribusi beras ke kampung-kampung, khususnya pada bulan Agustus hingga September. Mengingat, dengan kemungkinan akan datangnya musim angin selatan dengan gelombang laut yang tinggi, tentunya akan menyulitkan proses penyaluran beras tersebut.

“Saya juga minta, nanti pada Agustus dan September, saat musim angin selatan, Bulog dapat mengantisipasi distribusi beras agar yang di kampung-kampung pun mudah mendapatkan beras,” harap legislator Partai Demokrat itu. ■ man/sf

Jalur Kereta Baru-Parepare Diharapkan Rampung Tahun Ini



Wakil Ketua Komisi V DPR RI DPR RI Ibnu Munzir memimpin peninjauan jalur kereta Barru - Parepare. Foto: Oj/imi

Progres pembangunan jalur Kereta Api di segmen Barru - Parepare sudah rampung 99 persen dan hanya terkendala masalah pembangunan jembatan dan pembebasan lahan pemakaman. Wakil Ketua Komisi V DPR RI DPR RI Ibnu Munzir mengatakan, untuk jalur kereta api di Kabupaten Barru diharapkan tahun 2019 ini bisa selesai. Mengenai kendala pembangunan jembatan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan akan dilakukan dalam waktu secepatnya.

Hal tersebut diungkapkan Ibnu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI usai meninjau dan mendengarkan

Tol KLBM Jadi Contoh Pembangunan Tol Daerah Lain

Komisi V DPR RI mengapresiasi pembangunan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM) di Provinsi Jawa Timur. Pasalnya dukungan dalam menjalankan pembangunan tersebut sepenuhnya berasal dari dalam negeri, mulai dari pendanaan, konstruksi, pekerja, dan bahan baku. Proyek tol tersebut merupakan

”

**PEMBANGUNAN TOL
KLBM INI DAPAT
MENJADI CONTOH
BAGI PEMBANGUNAN
TOL DI DAERAH LAIN.**

konsinyasi PT. Waskita Bumi Wira terhadap pemerintah selama 45 tahun. Harapannya, pembangunan tol KLBM ini dapat menjadi contoh bagi pembangunan tol di daerah lain.

“Tidak ada bank asing dan negara asing yang masuk ke sini. Pembiayaannya dari PT. Waskita Bumi Wira yang melakukan konsorsium 42 bank dalam negeri senilai Rp 12 triliun. Ini sangat saya apresiasi karena tidak memakai APBN. Bahan bakunya kita beli sendiri dari produk dalam negeri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh di daerah lain,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau Tol KLBM, di Gresik, Jatim, Senin (01/04)

Anton mengatakan, nantinya tol KLBM konektivitasnya tidak hanya untuk pelabuhan, tetapi juga semua

pemaparan progress pembangunan *track* Jalur Kereta Api Lintas Makassar - Parepare, segmen Barru - Parepare oleh Dirjen Perkeretaapian Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (01/4).

"Pada prinsipnya semua masih *on progress*. Jadi kita berharap sesuai dengan target tahun 2020 sudah rampung semua pekerjaan jalur kereta api Makassar - Parepare. Dan saya lihat sendiri dari pembangunan jalur rel keretanya dan ketersediaan kereta dan gerbongnya pun sudah siap. Jadi kalau pembangunan jembatan rampung maka jalur kereta di Barru ini bisa segera dioperasikan, tapi belum sampai ke Pangkep dan Maros atau Makassar," kata Ibnu.

Terkait sumber dana untuk pembangunan jalur kereta api Makassar - Parepare, politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa selain dari APBN juga ada investasi swasta yang totalnya akan menelan biaya sekitar Rp 13 triliun. "Jumlah tersebut hanya untuk infrastruktur jalur kereta apinya saja. Belum termasuk pembangunan

infrastruktur pendukung seperti fasilitas stasiun, akses jalan dan lain-lain. Ketersediaan dananya sudah ada, berarti investasinya sudah berjalan," tandasnya.

”

JALUR KERETA API DI KABUPATEN BARRU DIHARAPKAN TAHUN 2019 INI BISA SELESAI.

Sementara itu, Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zamrides dalam paparannya menyebutkan panjang jalur KA Makassar - Maros-Pangkajene - Barru - Parepare mencapai 145 Kilometer. Terdiri dari 16 Stasiun di jalur utama (Main Line), 7 Stasiun Besar dan 9 Stasiun Kecil dan 3 Stasiun *sidding track* yaitu Garongkong, Tonasa dan Bosowa.

Ada sekitar 55 jembatan dengan bentang antara 30-406 meter, perpotongan jalan sebanyak 124 titik. Hal inilah yang memerlukan waktu dalam pembangunannya dan diharapkan bisa selesai sesuai target," jelasnya.

Zamrides juga mengungkapkan terkait kendala pembangunan jembatan sudah dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, sementara penyelesaian pemindahan lahan pemakaman juga sudah difasilitasi oleh Bupati Barru bersama MUI Sulsel dan bisa diselesaikan dengan baik.

Sebelum melakukan tinjauan lapangan, Tim Kunker Komisi V DPR RI DPR RI terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Barru Suardi Saleh di rumah jabatan Bupati dengan dihadiri seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI.

Kunker ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi V DPR RI diantaranya Alex Indra Lukman, Rendy M. Affandy Lamadjido, Hamka B. Kady, Ridwan Bae, Agung Budi Santoso, Hartanto Edhie Wibowo, Bahrum Daido, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Abu Bakar Wasahua, dan Sahat Silaban. ■ oji/sf



masyarakat bisa menikmati tol KLBM mulai dari Gresik sampai ke Surabaya. Dari Madiun nantinya juga melewati tol ini, sehingga ke depan akan menjadi jalan sentral penghubung ke semua kota/kabupaten di Jatim. "Di tahun 2020 akhir pengerjaan tol sepanjang 38 KM sudah bisa dilalui. Sehingga untuk dari Gresik ke Surabaya tidak ada lagi kemacetan," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Anton berharap setelah konsinyasi selesai selama 45 tahun dan utang sudah lunas, agar jalan tol tersebut bisa digratiskan atau tarifnya bisa diturunkan untuk semua pengguna jalan tol. "Kalau setelah 45 tahun harusnya tidak usah bayar lagi. Tapi tentu harus ada biaya perawatan yang harus kita bayar. Itu bisa dari pajak atau dari yang lain. (Tapi tarif nantinya) jangan sebesar seperti sekarang. Kalau sekarang bayarnya Rp 5000-7000, mungkin nanti Rp 2000-3000," saran legislator dapil Jawa Barat V ini. ■ azk/sf

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR-RI DI RANGKAIKUN KERJA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018-2019 DI SULAWESI SELATAN



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung memimpin Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI bertemu dengan Pemrov Sulsel. Foto: Hendra/mi

Sulsel Siap Terima Investasi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung mengapresiasi ketersediaan listrik

di Provinsi Sulawesi Selatan yang jumlahnya sangat besar dan mampu mendistribusikan hampir 99 persen listrik hingga pelosok daerah. Tak hanya itu, kelebihan listrik sebesar 45 persen dari kebutuhan yang ada, menjadi indikator bahwa kekuatan listrik Sulsel siap menerima kedatangan investor, guna meningkatkan pemakaian listrik di Sulsel.

"Kapasitas listrik di Sulawesi Selatan over, jadi yang mestinya itu idealnya cuman 30 persen kelebihannya, di Sulsel kelebihan listriknya mencapai 45 persen," ungkap Tamsil Linrung usai memimpin dialog Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman beserta jajaran di Makassar, Sulsel, Jumat (29/3).

”

**SECARA
INFRASTRUKTUR
KETENAGALISTRIKAN
SERTA FAKTOR
GEOLOGI KAWASAN
INI CUKUP
BERPOTENSI UNTUK
DIJADIKAN SUMBER
PEREKONOMIAN**

Sehingga, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyerukan agar investor bisa menginvestasikan usahanya di Sulsel, mengingat secara infrastruktur ketenagalistrikan serta faktor geologi kawasan ini cukup berpotensi untuk dijadikan sumber

perekonomian. Di sisi lain, Sulsel juga memiliki penduduk yang cukup padat.

"Perlu adanya investor untuk bisa menggunakan listrik yang berlebihan ini, apalagi kalau nanti sudah beroperasi PLTB di Jeneponto. Jadi sudah surplus listrik di sini. Tinggal bagaimana pemerintah daerah, dan tentu saja dengan pemerintah pusat harus mengupayakan mendorong tumbuhnya investasi di Sulawesi Selatan ini," tutur legislator dapil Sulsel ini.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi perhatian Komisi VII DPR RI terhadap ketersediaan listrik di daerahnya. Ia meyakini Sulsel adalah kiblatnya Indonesia timur, dan pihaknya pun siap memfasilitasi investor yang mau datang.

"Tentunya saya terima kasih kepada Komisi VII yang telah datang dan memberikan dukungannya terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan. Semoga apa yang didiskusikan ini bisa menjadi dorongan positif bagi pembangunan di Sulawesi Selatan," tutup Andi Sudirman. ■ **hs/sf**

Komisi VII Temukan Penyimpangan Pengelolaan Limbah Pertamina Dumai

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR

RI Muhammad Nasir menemukan penyimpangan pengelolaan limbah di kawasan PT. Pertamina Refinery Unit II, Kota Dumai, Provinsi Riau. Penyimpangan pengelolaan limbah itu, mulai dari penyimpanan limbah, pembuangan limbah, hingga keamanan di sekitar pembuangan limbahnya.

“Kunjungan kita ke sini untuk memastikan regulasi lingkungan hidup dan PPLH di kawasan Pertamina Refinery Unit II, Kota Dumai, dan ternyata dari kunjungan tersebut kita menemukan banyak temuan di lapangan terkait penyimpangan pengelolaan limbah,” ungkap Nasir di sela-sela peninjauan PT. Pertamina Refinery Unit II, Kota Dumai, Senin (01/4).

Lebih lanjut Nasir menyampaikan akan meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum)

”

PENYIMPANGAN PENGELOLAAN LIMBAH ITU, MULAI DARI PENYIMPANAN LIMBAH, PEMBUANGAN LIMBAH, HINGGA KEAMANAN DI SEKITAR PEMBUANGAN LIMBAHNYA.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti temuan ini. Apabila nanti temuan ini terbukti dan melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pihaknya minta proses ini tetap dilanjutkan sesuai peraturan perundangan yang ada.

“Temuan ini perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan agar perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMS mampu menjalankan regulasi dengan baik terutama terkait dengan lingkungan,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Nasir juga meminta agar proses Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 terhadap perusahaan BUMN maupun non-BUMN diperlakukan sama, dan yang terpenting dalam setiap prosesnya ada hadir di lapangan. Menurutnya, dalam setiap PROPER harus dirasakan kondisi-kondisi limbah, tidak hanya sebatas *assessment* saja.

“Ini kan limbah barang yang berbahaya dan beracun, maka tidak bisa semerta-merta hanya dengan dokumen dan pengantar saja kemudian hasil PROPER diberikan begitu saja. Kita akan memanggil seluruh panitia PROPER yang mengeluarkan seluruh hasil PROPER tersebut, karena cukup besar dan sangat berbahaya. Ini semua harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Riau II ini juga akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut izin terhadap perusahaan yang lalai terhadap pengelolaan limbah dan memproses secara hukum sesuai peraturan perundangan yang ada.

“Sudah banyak perusahaan yang telah diberi sanksi akibat kelalaian ini. Oleh karena itu kita akan mengevaluasi kembali proses PROPER yang ada saat ini. PROPER ini harus dilihat, dirasakan dan melihat langsung regulasi yang dilakukan perusahaan sudah sesuai atau belum,” tutupnya. ■ skr/sf



Tim Kunker Reses Komisi VII DPR meninjau pengelolaan limbah di kawasan PT. Pertamina Refinery Unit II, Kota Dumai, Provinsi Riau. Foto: Singgih/mi

Perlu Paradigma Baru , Penanganan Bencana

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mendorong kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menciptakan paradigma baru dalam menangani bencana. Selama ini BPBD dinilai hanya fokus pada tanggap darurat bencana dengan unit-unit terkait.

“Paradigma yang harus dibangun adalah paradigma yang fokus pada mitigasi membangun masyarakat yang peduli dan tanggap bencana. Salah satunya adalah melalui penguatan *Early Warning System (EWS)*,” ujar Sodik saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI pertemuan dengan BPBD Provinsi Riau, di Pos Komando Satgas Siaga Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi Riau, Senin (01/4).

Politisi Partai Gerindra ini berpendapat, penguatan EWS salah satunya dalam bentuk penguatan anggaran. Mengingat waktu peringatan dini merupakan aspek yang paling penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dan materi, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat peralatan EWS.

“Untuk itu Komisi VIII DPR akan berjuang tentunya secara bertahap di dalam penyusunan anggaran. Kita harus konsisten terhadap penguatan anggaran yang tidak hanya terfokus pada tanggap darurat, tapi juga terhadap mitigasi bencana. Untuk itu, kami akan catat dengan baik (berbagai aspirasi) untuk kemudian disampaikan pada rapat kerja dengan BNPB,” imbuh legislator dapil Jawa Barat I itu.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai, penanggulangan bencana oleh BNPB tidak bisa berdiri sendiri, terutama dalam kerangka aturan. Untuk itu, dirinya

mengusulkan perlu adanya perubahan di dalam Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana.

“Misalnya terhadap perusahaan swasta juga harus punya aturan untuk diatur dalam UU, bertanggung jawab

”

WAKTU PERINGATAN DINI MERUPAKAN ASPEK YANG PALING PENTING DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT, SEHINGGA DAPAT MEMINIMALISIR TERJADINYA KORBAN JIWA DAN MATERI

terhadap kebakaran di lahan konsesi. Terutama di Riau, kasus kebakaran hutan yang seringkali terjadi mungkin ke depan harus dibicarakan bersama,” usul politisi PDI-Perjuangan itu.

Dalam pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana itu nanti dirinya berharap adanya masukan lebih lanjut sehubungan dengan keterbatasan peraturan dalam implementasi penanggulangan bencana. “Ini tentunya agar membantu kami juga membangun pasal yang konstruktif ke depannya,” harap legislator dapil Jawa Barat III itu.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama Kepala BPBD Provinsi Riau Edwar Sanger menuturkan beberapa kendala dan hambatan diantaranya dalam menjalankan operasi karhutla, seperti kebutuhan helikopter dan juga regulasi. Dirinya mengharapkan agar aspirasi yang disampaikan tersebut nantinya bisa ditindaklanjuti.

“Kami juga mengharapkan adanya asuransi untuk kami yang bertugas di lapangan. Karena setiap hari risiko yang kami hadapi cukup berat sekali, seperti yang diketahui bertugas di lapangan dengan helikopter resikonya cukup tinggi. Kami berharap aspirasi kami ini bisa ditindaklanjuti,” harapnya. ■ tra/sf



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Riau. Foto: Tiara/mi

Perekaman Biometrik Haji Tangani Bencana



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (tengah). Foto: Chasbi/imi

Pemerintah Arab Saudi telah melakukan perubahan kebijakan untuk kegiatan perekaman biometrik, berupa perekaman karakteristik fisiologis berhubungan dengan bentuk tubuh bagi para calon jemaah ibadah Haji, yakni dilakukan di embarkasi asal. Namun Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai, perekaman biometrik ini tidak mudah dilakukan jika tidak ada sinergi instansi-instansi terkait.

“Komisi VIII DPR RI datang ke Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di UPT Embarkasi Asrama Haji guna menyerap aspirasi terkait permasalahan yang sedang berkembang di lapangan. Yang paling penting adalah persoalan tentang biometrik yang pada saat ini masih menjadi kendala pengurusan perekamannya,” ujar Ace saat memimpin

”

PEREKAMAN KARAKTERISTIK FISILOGIS BERHUBUNGAN DENGAN BENTUK TUBUH BAGI PARA CALON JEMAAH IBADAH HAJI.

Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Banjarmasin, Kalsel, Senin (01/4).

Pasalnya, menurut politisi Partai Golkar itu, perekaman biometrik saat ini dilakukan bersamaan dengan

pengurusan Visa, tentu ini menambah anggaran baik dari segi sarana maupun prasarana. “Sebelumnya, perekaman biometrik itu dilakukan pada saat calon Jemaah Haji akan berangkat ke Arab Saudi, kalau sekarang proses perekaman biometrik dilakukan bersamaan dengan pengurusan Visa,” katanya.

Untuk itu, Komisi VIII DPR RI mengajak berbagai instansi, khususnya Kementerian Agama RI untuk bersama-sama duduk mencari jalan keluarnya. “Oleh karena itu, kami akan melakukan berbagai upaya terhadap permasalahan tersebut. Agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon jemaah Haji, terkait perekaman biometrik yang perlu dicarikan solusinya segera mungkin,” tutup legislator dari Banten itu. ■cas/sf

Beasiswa Bidikmisi dan PIP Tingkatkan Prestasi Anak Bangsa

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan dengan hadirnya Beasiswa Bidikmisi dan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai upaya meningkatkan prestasi anak bangsa. Khusus untuk Beasiswa Bidikmisi, membuat kuliah di perguruan tinggi bukan lagi hanya menjadi milik orang mampu.

“Beasiswa Bidikmisi membuat kuliah di perguruan tinggi bukan lagi milik orang mampu, tetapi telah menjadi milik semua orang yang punya cita-cita. Sementara Beasiswa PIP bertujuan untuk memotivasi para siswa untuk lebih berprestasi di sekolah tanpa terkecuali,” kata Sutan, dalam rilis yang diterima **Parlementaria**, Senin (01/4).

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dengan hadirnya berbagai beasiswa pendidikan itu, anak-anak Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi orang yang berguna dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi.

Menurut Sutan, kepedulian semua pihak dalam menunjang pendidikan menjadi kata kunci meningkatkan

”

KHUSUS UNTUK BEASISWA BIDIKMISI, MEMBUAT KULIAH DI PERGURUAN TINGGI BUKAN LAGI HANYA MENJADI MILIK ORANG MAMPU.

kualitas pendidikan di semua daerah, tanpa terkecuali. “Oleh karena itu, saya harap anak-anak walaupun tinggal di daerah pedalaman, pinggiran, dan tertinggal, jangan kalah dengan anak kota,” pesan legislator dapil Jambi itu

Diketahui, tahun 2019 ini pemerintah meningkatkan anggaran Beasiswa Bidikmisi, sehingga penerimanya mencapai 130 ribu mahasiswa di seluruh Indonesia. Kuota ini meningkat 50 persen dari tahun 2018, sebanyak 85 ribu mahasiswa. Sementara Beasiswa PIP pada tahun 2018 telah digelontorkan kepada 18,7 juta peserta didik yang terdiri dari pelajar SD, SMP, dan SMA/SMK. ■ **sf**



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Foto: Purntholmi

Pelaporan Siskeudes Bali Hadapi Berbagai Kendala

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyoroti sistem pelaporan Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 di Provinsi Bali yang banyak menemukan kendala. Hafisz menilai, hal tersebut mengakibatkan terlambatnya laporan keuangan masuk dari aparat desa ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Sistem pelaporan Siskeudes banyak menemukan kendala. Sehingga, banyak sekali keterlambatan laporan keuangan dari desa ke BPKP,” ujar Hafisz usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra. Foto: Andri/mi

Komisi II Akan Perkuat Sisi Administratif dan Yuridis BPN

Kerja Reses Komisi XI DPR dengan Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BPS, BPK dan BPKP, di Gedung Perwakilan BI, Bali, Senin (01/4).

Legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I ini mengingatkan, perangkat desa beserta jajarannya jangan sampai dibuat *confused* oleh sistem yang ada. Hafisz mendorong BPKP, agar sistem pelaporan harus dibuat mudah mungkin.

"Ini yang harus kita selaraskan, sehingga sistem pelaporan Siskeudes 2.0 ini harus mudah dan tidak mempersulit. Sistem pelaporan ini jangan menjadi momok," tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Hafisz menilai, mengingat dana untuk pembangunan desa digelontorkan setiap tahun, maka tidak mungkin karena tidak adanya laporan, lantas uangnya ditahan. Hal tersebut mustahil dilakukan, karena akan menghambat pertumbuhan desa tersebut.

"Jangan sampai, oleh karena ketidakmampuan satu-dua orang dalam membuat laporan, lantas mengakibatkan desa tersebut tidak bisa membangun. Jika dilakukan, itu artinya sama saja kita menghambat pertumbuhan desa tersebut. Hal ini yang kita minta kepada BPKP supaya mencari solusi," pungkas Hafisz.

■ pun/sf

Komisi II DPR RI menghendaki Badan Pertanahan Nasional (BPN) diperkuat secara kelembagaan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Banten menyampaikan, BPN bukan hanya semata menjadi kantor administratif pertanahan, tetapi juga menjadi kaki tangan negara pada semua tingkatan.

Selain itu, BPN secara tupoksi menyelesaikan dan mengerjakan tugas pokok fungsinya juga menjaga kedaulatan negara, bukan dari sisi yuridisnya saja, tetapi dari sisi objeknya. Menurut Herman, itu semua akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang sedang dalam pembahasan.

"Masalah pertanahan akan kita tuangkan dalam sebuah konsepsi dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan, strategi apa, mekanisme apa, tentu ini terus digodok sampai kita menemukan persepsi dan Rancangan Undang-Undang yang ideal. Semoga nanti bisa akan kita sahkan di Paripurna," papar Herman di sela-sela Kunker Komisi II DPR RI ke Banten, Jumat (29/3).

Mengenai konflik pertanahan,

Herman mengatakan, tidak akan selesai konflik tersebut selama BPN tidak memiliki kewenangan penuh. Karena di sisi lain BPN memediasi beberapa konflik, tapi penyelesaian konfliknya ada di Pengadilan Umum. Menurutnya harus ada peradilan khusus yang menyelesaikan masalah konflik pertanahan.

"Ini harus ada peradilan khusus di bidang pertanahan, sehingga secara spesifik kasus-kasus pertanahan bisa diselesaikan secara baik," tegas legislator Partai Demokrat itu.

Saat pertemuan Tim Kunker Komisi II DPR RI Kepala Kantor BPN se-Provinsi Banten, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan BPN Provinsi Banten Andi Tanri Abeng Kakanwil menyampaikan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kanwil BPN Provinsi Banten, termasuk pencapaian di tahun 2018.

Pada tahun 2018, jelas Andi, Kanwil BPN Provinsi Banten telah merealisasikan 97,88 persen target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Di tahun 2019, BPN Banten juga akan lebih gencar mensosialisasikan PTSL kepada masyarakat, salah satunya melalui program Gerakan Masyarakat Memasang Tanda Batas (GEMA PATAS).

"GEMA PATAS sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur dan sudah dilaksanakan, Insya Allah ini semua bisa mempercepat kita melaksanakan PTSL," ujar Andi dalam paparannya.

Terkait dengan penanganan masalah pertanahan, selama tahun 2018 BPN Banten sudah menangani 459 perkara, dengan rincian 103 perkara selesai dan 356 masih berjalan. BPN Banten juga sudah mencanangkan zona integritas secara internal di seluruh kantor BPN Povinsi Banten. Komisi II DPR RI mengapresiasi capaian dan usaha yang telah dilakukan BPN Banten untuk meningkatkan pelayanan publik. ■ eko/sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Foto: Surya/tni

BSSN Harus Mampu Deteksi Dini Serangan Siber



Anggota Baleg DPR RI Hermanto. Foto: Eno

”

SERANGAN SEPERTI INI IBARAT SERANGAN RAYAP TERHADAP BANGUNAN YANG TERUS MERAYAP PELAN-PELAN, LAMA-LAMA TIBA-TIBA BANGUNAN POKOKNYA RUNTUH.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hermanto mengatakan bahwa menjaga, memelihara keamanan dan ketahanan sebuah negara itu jauh lebih penting dibandingkan dengan segala-galanya. Untuk itu, ia mengharuskan jajaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mampu mendeteksi lebih awal terhadap serangan-serangan siber, terutama untuk mengacaukan pertahanan dan keaman negara.

“Atas dasar pemikiran itu, saya melihat serangan siber ini yang sebenarnya sangat sangat senyap dan sangat sepi. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Serangan seperti ini ibarat serangan rayap terhadap bangunan yang terus merayap pelan-pelan, lama-lama tiba-tiba bangunan pokoknya runtuh,” ujar Hermanto saat Rapar Dengar Pendapat (RDP) Baleg dengan jajaran BSSN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).

Anggota Komisi IV DPR RI itu menilai bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang keamanan dan ketahanan siber harus memuat kemampuan dari teknologi yang dimiliki BSSN untuk mendeteksi lebih awal. “Di situ sebenarnya letaknya poin pentingnya, karena kalau kita tidak mampu mengatasi sejak awal, saya pikir kita sudah kebobolan segala-galanya. Jadi pertahanannya letaknya di sana,” tambah Hermanto.

“Seberapa jauh sistem dan sumber daya manusia kita itu mendeteksi lebih awal dari mana serangan siber itu datang. Nah, kalau kita tidak mampu miliki ini, saya pikir ini nanti dalam undang-undang ini, harus dilakukan suatu penguatan tentang sistem seperti apa yang sudah bangun dan sumber daya seperti apa yang harus kita butuhkan,” tegas Hermanto.

Politisi Fraksi PKS itu mengungkapkan peran BSSN memang dibutuhkan, sebagai salah satu konsekuensi dari pesatnya

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Informasi dari orang per orang yang beredar saat ini sudah tidak mengenal jarak, bahkan bisa menasar ke ranah yang sifatnya pribadi.

“Saya inginkan supaya badan ini mampu mendeteksi secara awal dan setelah mendeteksinya, juga mampu melumpuhkannya. Jadi bukan hanya sekadar mendeteksi, tapi juga mampu melumpuhkannya, dan mengusir. Sehingga serangan tersebut tidak lagi mampu masuk ke dalam sistem pertahanan kita,” pungkas politisi dapil Sumatera Barat I itu.

Sementara itu, Kepala BSSN Djoko Setiadi menyampaikan bahwa saat ini BSSN telah membangun sistem deteksi dini atas serangan-serangan siber secara nasional. Untuk itu dibutuhkan regulasi atau undang-undang yang mengatur agar sistem tersebut dapat menjangkau seluruh penjuru Tanah Air. ■ es/sf

BK DPR Gelar FGD Uji Konsep RUU Guru Desa

Badan Keahlian (BK) DPR RI bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) uji konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Guru. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang BK DPR RI Inosentius Samsul mengatakan, konsep RUU dibahas ini merupakan hasil dari seminar sebelumnya di tempat yang sama. Menurutnya, kontinuitas pemikiran itu penting, karena dalam setiap pembuatan UU banyak sekali masukan

”

KE DEPAN KAPABILITAS GURU PERLU DITAMBAHKAN KOMPETENSI LAIN. MISALNYA KOMPETENSI PEMECAHAN DAN PENGUSAHAAN TEKNOLOGI.

dan pengembangan yang sudah ada sebelumnya.

“Jadi kegiatan ini adalah kelanjutan kerja sama antara UNP dan Badan Keahlian, sehingga asal-usul dari setiap rumusan-rumusan itu bisa diikuti. Dan masukan-masukan yang kita dapatkan itu betul-betul berlanjut atau mengembangkan apa yang sudah ada sebelumnya, jadi sangat konstruktif,” pungkasnya usai FGD uji konsep RUU Guru di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Kamis (28/3).

Selain itu, Sensi, sapaan akrab Inosentius juga menjelaskan beberapa poin masukan terhadap RUU Guru. Pertama terkait kompetensi guru, ke depan kapabilitas guru perlu

ditambahkan kompetensi lain. Misalnya kompetensi pemecahan dan penguasaan teknologi.

Yang kedua, soal beban kerja guru saat ini harus diformulasi lagi. Poin berikutnya, mengenai kewenangan urusan pendidikan. Ke depan peran pemerintah pusat harus diperkuat agar guru tidak dipolitisasi. Tetapi disamping itu juga mutu pendidikan perlu dijaga melalui kebijakan yang ditetapkan secara nasional.

Lalu, terkait dengan pendidikan keguruan, ada harapan yang kuat terkait *supply and demand* guru, karena saat ini lebih tinggi *supply* lulusan pendidikan guru dibanding *demand*.

“Cuma persoalannya kualitasnya seperti apa. Ke depan untuk menata ini tidak mudah, karena ternyata banyak juga lulusan-lulusan pendidikan guru ini yang menganggur. Sehingga ke depan bisa saja dibatasi penyelenggara pendidikan keguruan ini,” imbuhs Sensi.

Terakhir, ada satu kesepakatan bahwa profesi guru ini menjadi profesi yang tertutup. Pengertian tertutup adalah yang boleh jadi guru yakni seseorang yang sejak awal punya bakat, minat dan juga mengenyam pendidikan keguruan. “Bukan orang-orang yang mengambil jurusan yang sifatnya umum, terus kemudian mengambil kursus pendidikan guru 1-2 bulan bisa mengajar. Ke depan mau diperketat,” tutupnya. ■jk/sf



Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang BK DPR RI Inosentius Samsul.
Foto: Jaka

Pimpinan dan Anggota DPR RI,
serta Pejabat dan Karyawan Setjen & BK DPR RI
mengucapkan

Selamat Memperingati
Isra Mi'raj
Nabi Muhammad SAW



Pembaruan Dapodik Penyebab Masalah Pengelolaan Dana BOS



Kepala PKAKN Badan Keahlian DPR RI Helmizarl. Foto: Nadya

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizarl mengatakan, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang tidak akurat menyebabkan terjadinya kurang salur dan lebih salur pada pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal inipun turut diakui oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dapodik yang tidak akurat itu disampaikan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota dan provinsi.

“Sehingga provinsi kekurangan membayar kepada pihak sekolah, karena langsung dari rekening umum pemerintah daerah, dan disampaikan kepada sekolah-sekolah, tidak sampai ke kabupaten dan kota,” katanya usai pertemuan Tim PKAKN BK DPR RI dengan jajaran Pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait pengumpulan data dan informasi tentang Dana Bos di Perkantoran Pemprov Jabar, Bandung, Kamis (28/3).

Selain itu, Helmi juga mendapati adanya perpindahan sekolah-sekolah, dimana peserta didik di dalamnya tidak terdaftar sebagai penerima

”

DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) YANG TIDAK AKURAT MENYEBABKAN TERJADINYA KURANG SALUR DAN LEBIH SALUR PADA PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS).

Dana BOS. Bahkan, sekolah-sekolah tersebut adalah sekolah terbuka yang induk sekolahnya tidak terdaftar. Hal ini pun menjadi kendala bagi Pemprov Jabar dalam pengelolaan Dana BOS. Oleh karenanya, masih banyak PR yang harus dibenahi utamanya yang berkaitan dengan data.

“Jadi perpindahan itu adalah sekolah terbuka, yang memang peserta didiknya itu tidak terdaftar pada sekolah yang mereka menginduk kepada sekolahnya itu. ini yang menjadi kendala juga bagi pemerintah

provinsi dalam menyalurkan dana kepada sekolah-sekolah dan sekolah terbuka itu belum termasuk di dalam pembagian Dana BOS itu yang mereka menjadi kendala juga,” ungkap Helmi.

Sementara Analis APBN PKAPN BK DPR RI Teuku Surya Darma berpendapat soal sulitnya pembaruan (updating) Dapodik itu mungkin diakibatkan karena pemahaman sekolah dalam menginput data secara intensif belum dilakukan, ditambah juga minimnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak pemprov kepada sekolah. Apakah dilakukan secara berkala, dan berjalan dengan dengan baik dan juga pengawalannya. Menurutnya hal inilah yang perlu disinergikan, diharmonisasikan, dan disinkronisasikan antar stakeholder.

“Sehingga tidak akan ada saling tuduh, bahwa data A itu yang terlambat, data B terlalu cepat dan data yang tidak akurat dan lain sebagainya. Makanya updating data dengan mekanisme yang memudahkan bagi pihak sekolah dan juga bagi pihak pembina yaitu pihak pemerintah daerah yaitu harus dilakukan secara sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi yang kuat dan baik,” kata Surya.

Surya melanjutkan, dampak dari adanya data yang tidak akurat adalah tidak diterimanya hak bagi sekolah. Karena data hitungannya berdasarkan jumlah siswa, maka siswa di sekolah tidak memperoleh hak tersebut. Dampak ini cukup besar bagi sekolah dan siswa, meskipun penyebabnya adalah hal yang cukup sepele dan kecil. “Itu yang perlu ditindaklanjuti secara serius dan baik, dan juga terkait dengan data yang akurat agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang,” harapnya. ■ ndy/sf

Humas DPR Raih Penghargaan Bronze pada Ajang PRIA 2019



Kepala Bagian Humas DPR RI Minarni menyubstitusi penghargaan Bronze Award untuk Kategori Government PR dari ajang Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2019. Foto: Dok/ri

Minarni menjelaskan dalam ajang PRIA 2019 ini Humas Setjen dan BK DPR RI mencoba mengedukasi masyarakat tentang Parlemen, melalui tema “Literasi Untuk Demokrasi”.

Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, untuk kedua kalinya meraih penghargaan Bronze Award untuk Kategori Government PR dari ajang Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2019. Kepala Bagian Humas DPR RI Minarni mengatakan, dengan memenangkan Bronze Award ini menjadi bentuk apresiasi dari pihak eksternal, sekaligus menjadi sebuah prestasi atas kinerja Humas Setjen dan BK DPR RI.

Usai menerima penghargaan PRIA 2019, di Bandung, Jawa Barat baru-baru ini, Minarni menjelaskan dalam ajang

PRIA 2019 ini Humas Setjen dan BK DPR RI mencoba mengedukasi masyarakat tentang Parlemen, melalui tema “Literasi Untuk Demokrasi”. Dengan kata lain, Edukasi Parlemen ini menjadi salah satu program Humas Setjen dan BK DPR RI untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sejak usia dini melalui metode fun learning.

Kegiatan yang dilakukan dalam Edukasi Parlemen ini diantaranya *Edutainment*, *Tour the Parliament*, dan *I am The Legislator*. Selain mengajarkan tentang demokrasi dan tata negara, Humas Setjen dan BK DPR RI juga mencoba memberikan pengalaman singkat kepada masyarakat bagaimana

para Anggota DPR RI bekerja, terutama saat bersidang.

Literasi Edukasi Parlemen yang dipaparkan oleh perwakilan dari Humas DPR RI tersebut cukup menarik perhatian lima juri PRIA 2019 yang terdiri dari akademisi, Praktisi Humas, dan kalangan birokrat, yakni Irwa Zarkasi (Universitas Al-Azhar Indonesia), Ariani Djalal (Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden), Asmono Wikan (Founder dan CEO PR Indonesia), Arif Mujahidin (Communication Director Danone Indonesia), dan Magdalena Wenas (PR Guru) sebagai Ketua Dewan juri.

Hingga akhirnya juri menetapkan Humas Setjen dan BK DPR RI sebagai peraih penghargaan Bronze untuk Kategori Government PR dari ajang yang diselenggarakan sejak tahun 2016 oleh Majalah PR Indonesia ini. Minarni menegaskan, penghargaan tersebut tidak membuat unit kerja yang dipimpinnya lantas berpuas diri. Hal itu malah sebagai pemacu untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi, sehingga ke depannya menjadi lebih baik lagi. Minimal harus bisa mempertahankan penghargaan yang sudah diraihinya hingga saat ini.

“Saya berharap penghargaan ini semakin memacu kami untuk bekerja dan berbuat lebih baik lagi, dalam arti meningkatkan kinerja dan prestasi, atau paling tidak bisa mempertahankan prestasi yang sudah ada. Bahkan saya berharap tahun depan kami tidak hanya mengirimkan satu entry atau literasi saja, tapi bisa lebih. Namun tentunya itu semua perlu dukungan, kerja sama atau sinergi dari unit kerja lainnya di lembaga ini,” pungkas Minarni. ■ **ayu/sf**



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto memandu pelantikan dua orang Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2). Foto: Arief-Kresno/rni



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat mengisi Seminar 'Peran Teknologi Informasi Finansial dalam Mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia' yang diselenggarakan INDEF di Jakarta, Selasa (26/3). Foto: Jaka/rni



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto saat menghadiri seminar yang bertema 'Perempuan dalam Profesi Audit Internal di Indonesia Peluang dan Tantangan', di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4) Foto: Gerald/rni

